

PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN INKLUSI KEUANGAN BAGI MASYARAKAT PESISIR TUBAN: STUDY EKPLORATIF

Johan

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: johanjio65@gmail.com

Mugiyati

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: mugiyati@uinsby.ac.id

Moh Arifin

STAI Al-Fithrah Surabaya
Email: arifin.dzulqornaen@gmail.com

Sriwulan

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
Email: biowulan08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT dalam mengimplementasikan inklusi keuangan dan bagaimana peran BMT dalam merealisasikan inklusi keuangan pada masyarakat pesisir Tuban. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Objek dalam penelitian ini adalah BMT Surya Rahardja Tuban, dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan pengelompokan data, reduksi dan eliminasi, memfilter data yang di eliminasi, dan identifikasi data. Tiga mekanisme yang digunakan oleh BMT Surya Rahardja dalam mewujudkan inklusi keuangan yaitu sosialisasi, strategi marketing dan *roll play*. Untuk memaksimalkan perannya sebagai inklusi keuangan maka BMT Surya Rahardja menggunakan tiga cara yaitu *door to door*, kunjungan pasar dan *open table*. Konsistensi BMT Surya Rahardja dalam merealisasikan peran inklusi keuangan telah mampu meningkatkan kemudahan akses kepada masyarakat pesisir Tuban. Jumlah nasabah dari BMT Surya Rahardja telah mengalami peningkatan pada 2018 sebanyak 7.700 dan pada 2019 sebanyak 9.200. jika di persentasekan, kenaikan total nasabah yang terdiri dari

tabungan dan pembiayaan sebesar 19%. Kinerja BMT Surya Rahadja sebagai inklusi keuangan syariah non bank terbilang efektif karena dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan telah meningkat.

Kata Kunci: BMT, Inklusi Keuangan, Masyarakat.

Abstract

This study aims to determine the activities of BMT in implementing financial inclusion and how the role of BMT in realizing financial inclusion in the coastal community of Tuban. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. The object of this research is BMT Surya Rahardja Tuban, with data collection techniques using interviews, observation and documentation. The analysis technique uses data grouping, reduction and elimination, filtering the eliminated data, and identifying data.

Three mechanisms used by BMT Surya Rahardja in realizing financial inclusion are socialization, marketing strategy and roll play. To maximize its role as financial inclusion, BMT Surya Rahardja uses three ways namely door to door, market visit and open table. Surya Rahardja's BMT consistency in realizing the role of financial inclusion has been able to improve access to coastal communities in Tuban. The number of customers from BMT Surya Rahardja has increased in 2018 by 7,700 and in 2019 by 9,200. if in percentage, the total increase in customers consisting of savings and financing by 19%. The performance of the Surya Rahadja BMT as a non-bank Islamic financial inclusion is quite effective because from year to year the interest of the public to use financial services has increased.

Key Words: BMT, Financial Inclusion, Society.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mampu meng-cover beberapa sektor, baik di bidang komersial, finance, pasar modal, Asuransi, baitul mal wat tamwil (BMT) dan institusi filantropi Islam berupa keuangan

sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.¹ Pada dasarnya lembaga keuangan mikro syariah meliputi beberapa lembaga yaitu bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), BMT. kegiatan produktif ditumbuh kembangkan melalui *product* berbasis syariah yang ada d BMT.² Disamping itu juga, BMT melaksanakan pengelolaan dana filantropi yang kemudian di distribusikan kepada dhuafa.³

Pada akhir tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terkait pelayanan *non office* untuk mengakselerasi *finance inclusion* demi terciptanya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan memperluas akses bagi lembaga keuangan syariah. Keunculan keuangan inklusif di Indonesia karena banyaknya kelompok masyarakat bawah, berpenghasilan rendah, pekerjaan tidak jelas, masyarakat penggiran yang pada umumnya unbanked-tidak memiliki rekening bank. Berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat unbanked adalah *price barrier*, *information barrier*, *design produk barrier* dan *channel barrier*.⁴ Oleh sebab itu perlu adanya keuangan inklusif di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di daerah pesisir karena masyarakat pesisir memiliki local wisdomnya sendiri.⁵

Menurut Survey OJK pada tahun 2019 tentang inklusi keuangan menemukan bahwa indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka tersebut lebih mmeningkat jika dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 67,%.⁶ Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman masyarakat tentang inklusi keuangan sebesar 8,39%. Jika berdasarkan strata

¹ Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. (2018, December 10). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 187-216. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502>

² Andri Soemitra, *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 2.

³ Pertiwi, R., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020, June 15). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>

⁴ Yolanda Masnita, dkk. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan*. *Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera, Volume 1, Nomor 1*, Januari 2020, 26-37.

⁵ Mansur, M. (2019, January 15). Lokalitas Islam Pesisir (Studi Kasus Aktifitas Perembus dalam Perspektif 'Urf 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam Di Desa Kaduara Barat Pamekasan Madura). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 34-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3639>

⁶ www.OJK.co.id, di Akses pada 28 April 2020.

wilayah, untuk perkotaan indeks inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60%, sementara indeks inklusi keuangan masyarakat perdesaan 68,49%. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan dari keuangan inklusif di masyarakat perdesaan.

Keuangan inklusif adalah tersedianya akses masyarakat terhadap pembiayaan, tabungan, transfer dan asuransi, dari lembaga jasa keuangan, untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak memiliki agunan, pelayanan nyaman, bertanggung jawab, biaya terjangkau, adil, transparan dan diatur oleh Undang – undang. Keberadaan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) di pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini sudah beroperasi lebih dari 5 tahun, hal ini tentunya masyarakat di daerah pesisir pantai utara Kecamatan Palang ini telah menggunakan produk dan jasa layanan keuangan yang ditawarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) sudah melaksanakan perannya secara optimal sebagai inklusi keuangan di masyarakat perdesaan khususnya daerah pesisir Tuban.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melihat fenomena BMT dalam melakukan perannya sebagai keuangan inklusif di daerah pesisir Tuban. Pada penelitian ini lebih fokus pada kegiatan BMT dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemudahan akses permodalan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi.

Objek dalam penelitian ini adalah BMT Surya Rahardja Tuban yang sudah menerapkan kegiatan operasional berupa pembiayaan dan tabungan untuk masyarakat pesisir Tuban. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menjadikan para pengurus BMT dan masyarakat sebagai informan kunci dan informan utama. Fenomenologi memiliki prosedur dalam analisis data yaitu: *pertama*, membuat daftar pengelompokan awal data yang diperoleh. *Kedua*, reduksi dan eliminasi. *Ketiga*, mengelompokkan data dari hasil eliminasi yang belum difilter. *Keempat*, *finishing* indentifikasi pada data yang diperoleh dengan menggunakan validasi awal data.⁷ Melakukan konstruksi pada definisi yang bersifat tekstual dari informan serta

⁷ Nurul Jannah. *Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)*. Tesis, Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.

memverifikasi hasil yang sudah di analisis untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah.

Terminologi BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)

Kegiatan lembaga keuangan berhubungan dengan sektor keuangan yang meliputi *funding* dan *lending* serta kegiatan jasa lainnya. Operasional lembaga keuangan dilaksanakan menggunakan sistem berbasis syariah dan konvensional. Sistem syariah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan konvensional, baik dalam mencapai tujuan, mekanisme pelaksanaan, otoritas, ruang lingkup dan tanggungjawabnya.⁸

BMT adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah dengan menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu aktivitas.⁹ Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT bersumber dari filantropi Islam untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial.¹⁰ Sedangkan dalam melaksanakan bisnis BMT mendistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan produktif.¹¹ Menurut Ahmad Hasan Ridwan BMT adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi untuk masyarakat bawah dengan mendorong melalui produk tabungan dan pembiayaan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat marginal. BMT juga merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat.¹²

Menurut Neni Sri Imaniyati BMT adalah lembaga untuk memberdayakan ekonomi rakyat dalam rangka menumbuh kembangkan berbagai macam usaha produktif dan investasi dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam meningkatkan kualitas pendapatan pengusaha kecil dan menengah dengan

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 29.

⁹ Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Economica*, Vol. 5. No. 2. Oktober 2018. 18.

¹⁰ Pertiwi, R., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020, June 15). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>

¹¹ HerryE., PermanaP., AjiW., & MuhtadiR. (2019). Total Quality Management Development and Sharia Governance Efforts in Sharia Micro Financial Institutions to Improve Market Share. :: *JIEEB :: international ournal of ntegrated ducation, ngineering and usiness* ::, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.29138/ijieeb.v2i1.809>

¹² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen BMT* (Jawa Barat : CV Pustaka Setia,2013), 23.

tujuan mampu mengentaskan kemiskinan. BMT dijalankan dengan dua jenis operasional yang terdiri dari *Baitul Tamwil* dan *Baitul Mal*. Kegiatan yang memiliki hubungan erat dengan pengembangan usaha produktif dan investasi bagi masyarakat *unbanked* dengan tujuan mampu mendorong kegiatan menabung dan memenuhi pembiayaan di *handle* oleh *Baitul Tamwil*. Untuk kegiatan yang khusus mengatur titipan dana filantropi untuk disalurkan kepada dalam bentuk sosial dipayungi oleh *Baitul Mal*.¹³

Peran dan Fungsi BMT sebagai Inklusi keuangan

Pada umumnya BMT erat hubungannya dengan masyarakat perdesaan dengan ekonomi yang relatif rendah. Baitul Mal Wat Tamwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:¹⁴

1. Dana yang dihimpun dan disalurkan diharapkan mampu meningkatkan utilitasnya agar unit surplus dan unit deficit dapat optimalkan.
2. Pemberi likuiditas harus mampu menciptakan alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan penerima, agar mampu memenuhi kewajibannya.
3. Pendapatan, adanya BMT akan mampu memberikan respon positif pada penciptaan lapangan pekerjaan dan kualitas pendapatan yang lebih baik.
4. Informasi, BMT sebagai lembaga mediasi harus mampu memberikan sebuah informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan serta peluang yang akan dihadapi oleh nasabah.
5. Pemberian pembiayaan tidak boleh memberikan usaha mikro kecil agar sirkulasi ekonomi masyarakat bawah tidak terperangkap oleh syarat yang terlalu berat dalam pengajuan.

Orientasi BMT sebagai lembaga yang independen lebih fokus pada pengembangan usaha produktif bagi anggota demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. dengan kata lain, BMT memiliki peran sebagai berikut: ¹⁵

1. Menjaga praktik ribawi tidak mendekati ekonomi masyarakat. mitigasi tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi akan bahayanya praktik ribawi dan bagusnya sistem ekonomi islam, serta memberikan pelatihan

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), 74.

¹⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 364.

¹⁵ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 379-380.

mengenai bagaimana bertransaksi yang islami tanpa adanya kerugian di salah satu pihak.

2. Pembinaan dan pendanaan untuk usaha kecil oleh BMT harus aktif tanpa adanya nepotisme sehingga pendampingan, penyuluhan dan pengawasan pada kegiatan usaha nasabah dapat dioptimalkan dengan baik.
3. Melepaskan kebutuhan masyarakat terhadap rentenir melalui produk yang dikeluarkan oleh BMT. Produk tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena ketergantungan masyarakat pada rentenir disebabkan karena kebutuhan masyarakat dapat dicapai. Oleh sebab itu, BMT harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan kemudahan dalam mengakses modal.
4. Distribusi ekonomi yang adil. Permasalahan yang sangat kompleks sering dihadapi oleh BMT yaitu ekonomi masyarakat. Maka dari itu, perlunya langkah-langkah dalam mengevaluasi dan memetakan skala prioritas dalam pembiayaan sehingga mampu memfilter kelayakan nasabah dalam pembagian golongan dan jenis pembiayaan.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah sangat tepat digunakan untuk melakukan pemberdayaan¹⁶, hal ini dilakukan untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, penghapusan kemiskinan akan mampu dilakukan dengan menggunakan perluasan akses usaha UMKM dalam memperoleh modal usaha, baik dari lembaga keuangan formal maupun dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).¹⁷ Pemberdayaan mikro akan menjadi alternatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga mampu berdaulat dibidang ekonomi.

Kebutuhan masyarakat akan modal usaha menjadi salah satu alasan perlunya inklusi keuangan di daerah pesisir karena akses modal yang sulit serta pengetahuan tentang lembaga keuangan yang minim akan memperlambat distribusi ekonomi masyarakat pesisir. Adanya inklusi keuangan pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan serta adanya hambatan bagi individu

¹⁶ Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura. *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga*

¹⁷ Setyani Irmawati, Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan. *Journal of economics and policy*. No 6. Vol 2. 2013, 103-113.

dalam mengakses produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Secara universal.¹⁸ World Bank menerangkan bahwa sekitar 50% orang telah memiliki lebih dari satu rekening bank dan yang lainnya masuk pada golongan *unbanked* (tidak menggunakan layanan jasa keuangan).¹⁹ *Unbanked* dalam hal ini adalah masyarakat yang kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan mikro syariah. Oleh sebab itu, peran BMT sebagai inklusi keuangan sangat diperlukan dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat perdesaan di daerah pesisir yang mayoritas adalah *unbanked*.

Inklusi keuangan

BMT memiliki peran penting dalam memberikan akses kepada masyarakat pesisir Tuban. Layanan BMT harus mampu menjangkau di seluruh pesisir Tuban dengan cara sosialisasi ke masyarakat, distribusi layanan BMT dapat di ukur melalui tingkat inklusi keuangan. Sistem keuangan yang semakin inklusif dapat mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalisir indikasi distribusi kredit nonformal yang bersifat eksploratif yang sangat merugikan masyarakat. BMT Surya Rahardja melakukan inklusi keuangan dengan beberapa cara:²⁰

1. Sosialisasi, aktivitas pengenalan baik produk maupun jasa yang di berikan oleh BMT Surya Rahardja kepada masyarakat dalam rangka membuka pola pikir masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dalam memberikan alternatif pembangunan ekonomi di masyarakat dengan menggunakan layanan keuangan sebaik-baiknya dalam aktivitas perekonomian yang di lakukan di masyarakat
2. Strategi Marketing, peran marketing dalam pengenalan produk BMT Surya Rahardja adalah salah satu cara untuk mencapai keuangan inklusif di masyarakat. Pengenalan dan pemasaran produk BMT Surya Rahardja sendiri tidak terlepas dari peran marketing mempromosikan produk dan layanan jasa BMT. Kegiatan operasional BMT Surya Rahardja dalam rangka menarik minat masyarakat agar menggunakan layanan jasa keuangan BMT dalam kegiatan prekonomian.

¹⁸ Adhitya Ginanjar, Strategi Kolaborasi *Branchless Bank Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 2 (2015): 199-209*

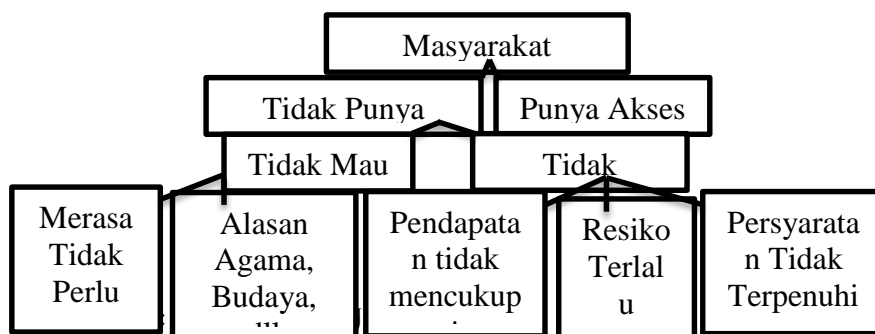
¹⁹ World Bank, 2014. *Global Financial Development Report*

²⁰ Agung, Manajer BMT Surya Raharja, *Wawancara, Tuban, 26 Mei 2020.*

3. *Roll Play*, kegiatan ini adalah yang dilakukan oleh BMT dalam penyelesaian keluhan atau permasalahan.

Tiga macam mekanisme yang dilakukan oleh BMT Surya Rahardja dalam mewujudkan inklusi keuangan, mekanisme ini digunakan untuk menjangkau masyarakat perdesaan dalam rangka mempersempit jarak antara orang kaya dan orang miskin. Dengan demikian, stabilitas ekonomi masyarakat pesisir Tuban dapat terwujud secara optimal. Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi masyarakat yang tidak punya akses kepada lembaga keuangan. Karena pada umumnya masyarakat terbagi dua yaitu mempunyai akses dan tidak punya akses kepada lembaga keuangan. Masyarakat yang tidak punya akses kepada lembaga keuangan disebabkan oleh dua hal yaitu tidak mau dan tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu disebabkan oleh: *pertama*, pendapatan tidak mencukupi. *Kedua*, resiko terlalu tinggi. *Ketiga*, persyaratan tidak terpenuhi. Untuk masyarakat yang tidak mau disebabkan oleh: *pertama*, merasa tidak perlu. *Kedua*, alasan agama, budaya, dll. Itulah yang menjadi alasan kenapa masyarakat tidak mempunyai akses kepada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Berikut gambar akses masyarakat.

Gambar 1. Akses Masyarakat



Gambar tersebut telah memberikan paparan yang jelas tentang alasan masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa lembaga keuangan. Persepsi tentang lembaga keuangan yang hanya digunakan oleh orang kaya masih melekat pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga keuangan perlu melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi pemikiran masyarakat yang masih awam pada lembaga keuangan. Salah satu caranya adalah dengan mengedukasi

²¹ www.OJK.co.id, di Akses pada 28 April 2020.

masyarakat dengan baik dan benar dan memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Adapun BMT Surya Rahardja telah melakukan langkah-langkah kongkrit dengan cara persuasif kepada masyarakat melalui pengajian rutin yang diselingi dengan pengetahuan produk-produk BMT.²² Masyarakat di edukasi agar mampu memahami produk BMT sehingga mau menggunakan jasa BMT dalam rangka memperbaiki ekonominya.

Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Pesisir Tuban.

Inklusi keuangan adalah bentuk kongkrit dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat kalangan bawah yang kesulitan mendapatkan akses kepada lembaga keuangan. Inklusi keuangan dikhususkan kepada lapisan masyarakat bawah (*the bottom of the pyramid*) agar mampu memanfaatkan produk dari jasa keuangan yang mempunyai legalitas dari pemerintah. Inklusi keuangan sangat kompleks karena kredit yang diberikan tidak hanya kepada masyarakat menengah kebawah dan usaha kecil tetapi juga adanya maksud dan tujuan yang lain yaitu mengurangi angka kemiskinan dengan cara menerapkan keadilan dalam distribusi pendapatan untuk mencapai kedaulatan ekonomi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.²³

Penggunaan layanan keuangan syariah pada masyarakat pesisir Tuban sudah lebih baik dan terus mengalami peningkatan. Produk tabungan yang paling dominan di BMT Surya Rahardja adalah SIMJAKA (simpanan berjangka). Simpanan ini berjangka panjang berdasarkan prinsip mudharabah dengan menggunakan sistem *profit sharing*, hasil dari usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi modal dan BMT Surya Rahardja.²⁴ Uniknya simpanan ini dapat dijadikan agunan dalam melakukan pembiayaan di BMT Surya Rahardja. BMT Surya Rahardja dalam menjalankan Perannya sebagai inklusi keuangan menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:²⁵

1. *Door to Door*

Pihak BMT senantiasa melakukan kunjungan ke beberapa rumah warga dalam rangka memberikan pengetahuan dan promosi produk tabungan

²² Agung, Manajer BMT Surya Raharja, *Wawancara*, Tuban, 26 Mei 2020.

²³ Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1 April 2018.

²⁴ Diambil dari data Asli lembaga keuangan BMT Surya Rahardja.

²⁵ ng, Manajer BMT Surya Raharja, *Wawancara*, Tuban, 26 Mei 2020.

dan pembiayaan kepada masyarakat. Strategi ini cukup efektif dalam memasarkan produk keuangan syariah agar masyarakat lebih mengenal dan memahami potensi dari produk BMT dalam memperbaiki perekonomian masyarakat pedesaan.

2. Kunjungan Pasar

Beberapa karyawan BMT Surya Rahardja melakukan kunjungan ke pasar-pasar untuk menawarkan produk pembiayaan dan tabungan yang dimiliki oleh BMT. minimnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah terutama BMT membuat karyawan harus lebih extra dalam memasarkan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat.

3. *Open Table*

BMT Surya Rahardja membuka informasi dalam rangka memperkenalkan produk-produk BMT kepada masyarakat pesisir. Informasi yang diberikan kepada masyarakat sangat akurat dan akuntabel sehingga dalam implementasinya tidak terdapat unsur spekulasi.

Kebijakan yang diberikan oleh BMT Surya Rahardja dalam mengimplementasikan keuangan inklusif adalah sebagai berikut: pertama, mengeluarkan produk dan layanan kepada masyarakat seperti tabungan SIMASA (Simpanan Mudharabah Biasa), SIMJAKA (Simpanan Berjangka), SI BERKAH (Simpanan Berhadiah), SIMPATIK (Simpanan Pendidikan Terbaik), dan SI HANUM (Simpanan Haji dan Umrah). Kedua, memiliki produk pembiayaan mikro yang memang fokus untuk masyarakat pedesaan yang kesulitan akses modal pada lembaga keuangan. Produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Surya Rahardja terdiri dari Ar Rahn (Gadai), Murabahah (Jual Beli), dan Mudharabah (Usaha) dengan pelayanan berupa harian dan mingguan, bulanan atau flat dan musiman (4 Bulan).

Ketiga, kemudahan akses kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sistem pelayanan yang dikonsep untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan dan tabungan di BMT Surya Rahardja. Tidak hanya itu, BMT Surya Rahardja juga memberikan dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.²⁶ Ini akan menjadi salah satu bentuk kepedulian BMT Surya Rahardja kepada masyarakat pesisir Tuban yang membutuhkan dana dan mengalami kesulitan ekonomi didalam keluarganya. Produk-produk yang

²⁶ Agung, Manajer BMT Surya Rahardja, *Wawancara*, Tuban, 26 Mei 2020.

dikeluarkan sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat (permintaan masyarakat). dengan demikian, Masyarakat lebih apresiasi pada BMT dibandingkan dengan bank-bank pada umumnya, pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat bahwa BMT lebih memiliki fleksibilitas dalam setiap produk yang dimilikinya sehingga masyarakat sangat tertarik pada layanan yang dimiliki oleh BMT.

Konsistensi BMT Surya Rahardja dalam melaksanakan inklusi keuangan telah memberikan sebuah kesan positif bagi masyarakat pesisir tuban. persentasi jumlah nasabah dari BMT Surya Rahardja juga mengalami peningkatan yaitu pada 2018 sebanyak 7.700 dan pada 2019 sebanyak 9.200. jika di persentasekan, kenaikan total nasabah yang terdiri dari tabungan dan pembiayaan sebesar 19%. Kinerja BMT Surya Rahadja sebagai inklusi keuangan syariah non bank terbilang efektif karena setiap tahunnya minat masyarakat pada leyanan keuangan syariah meningkat sangat signifikan. Berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Fair Finance Guide International (FFGI) terdapat beberapa indikator dalam mewujudkan inklusi keuangan yang di ukur dalam penelitian ini.²⁷

Tabel: 1.1
Pengukuran Inklusi keuangan

No	Indikator FFGI dalam pengukuran inklusi keuangan	Praktik BMT Surya Rahardja
1.	Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan produk yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan kelompok marginal	Pelayan tersedia, karena BMT Surya Rahardja sebagian besar pelayanan merupakan strategi inklusi keuangan yang di design untuk masyarakat miskin dan kelompok usaha mikro kecil menengah
2.	Lembaga keuangan memiliki cabang di perdesaan	BMT Surya Rahardja memiliki cabang disaerah desa pesisir Tuban demi menyetarakan pendapatan masyarakat

²⁷ Rotue Nuraini Tampubolom, dkk, peran perbankan menuju keuangan inklusi di Indonesia (studi kasus penyaluran kredit usaha mikro melalui program kemitraan Kampoeng bNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BMI 46), 2016-2017.

3.	Lembaga keuangan memberikan informasi yang akurat terkait dengan hak-hak nasabah (resiko dan produk yang ditawarkan)	BMT Surya Rahardja memberikan informasi yang jelas kepada nasabah terkait produk, resiko dll. Guna mengantisipasi adanya kredit macet di masyarakat
4.	Persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan masih bersifat local	Persyaratan yang tersedia untuk masyarakat masih tergolong ringan tanpa memberatkan masyarakat miskin
5.	Lembaga keuangan membebaskan biaya yang sangat rendah	Sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh OJK tentang inklusi keuangan adalah masih berdasarkan pada daya saing dan kompetisi. Bank-bank BUMN menjadi pesaing dalam memasarkan produk BMT Surya Rahardja kepada masyarakat

Sumber: kinerja BMT Surya Rahardja, Data Diolah

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa BMT Surya Rahardja sangat totalitas dalam mengimplementasikan inklusi keuangan agar hasilnya lebih optimal dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap akses lembaga keuangan mikro syariah dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga kedaulatan ekonomi bagi masyarakat menengah kebawah dapat tercapai dengan baik. Para nasabahpun sangat amanah dalam menjalankan dana pembiayaan yang diberikan oleh BMT Surya Rahardja sehingga sehingga sirkulasi bisnis masyarakat pesisir Tuban lebih berkembang daripada sebelumnya. Optimalisasi peran yang dilakukan oleh BMT Surya Rahardja sebagai inklusi keuangan sangat agresif sehingga mitigasi praktik ribawi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kesimpulan

Baitul Mal Wat tamwil Surya Rahardja mampu memaksimalkan perannya sebagai inklusi keuangan di daerah perdesaan pesisir Tuban. Potensi masjid yang begitu besar sebagai tempat *problem solve* masyarakat di bidang ekonomi telah dibuktikan dengan baik. Dana BMT yang terkumpul dikelola dengan baik dan benar oleh tenaga profesional. Pengelolaan dana yang dilakukan melalui program

simpanan, pembiayaan dan sosial. Segala program yang tersimpan dalam produk BMT disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. BMT Surya Rahardja sebagai agen inklusi keuangan telah mampu berkontribusi kepada ekonomi masyarakat pesisir Tuban yang mayoritas adalah masyarakat *unbanked*. Masuknya BMT Surya Rahardja telah memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga karena adanya kemudahan dalam mengakses modal kepada lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka pemberdayaan melalui pengembangan usaha mikro.

Daftar Referensi

- Agung, Manajer BMT Surya Raharja, *Wawancara*, Tuban, 26 Mei 2020.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 379-380.
- Ginjar, Adhitya. Strategi Kolaborasi *Branchless* Bank Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi. *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 2 (2015): 199-209.
- Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. (2018, December 10). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 187-216.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502>
- Herry E., Permana P., AjiW., & Muhtadi R. (2019). Total Quality Management Development and Sharia Governance Efforts in Sharia Micro Financial Institutions to Improve Market Share. :: *JIEEB :: nternational ournal of ntegrated ducation, ngineering and usiness* ::, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.29138/ijeeb.v2i1.809>
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 364.
- Imaniyati, Neni Sri Aspek-aspek Hukum BMT (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), 74.
- Irmawati, Setyani. Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan. *Journal of economics and policy*. No 6. Vol 2. 2013, 103-113.
- Jannah, Nurul. REVITALISASI PERANAN MASJID DI ERA MODERN (Studi Kasus di Kota Medan). Tesis, Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.

- Mansur, M. (2019, January 15). Lokalitas Islam Pesisir (Studi Kasus Aktifitas Perembus dalam Perspektif ‘Urf ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam Di Desa Kaduara Barat Pamekasan Madura). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 34-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3639>
- Marlina, Lina dan Biki Zulfikri Rahmat, Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1 April 2018.
- Masnita, Yolanda. dkk. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan. *Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2020, 26-37.
- Masyithoh, Novita Dewi Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Economica*, Vol. 5. No. 2. Oktober 2018. 18.
- Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura. *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga*
- Pertiwi, R., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020, June 15). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>
- Ridwan, Ahmad Hasan Manajemen BMT (Jawa Barat : CV Pustaka Setia,2013).
- Soemitra, Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Soemitra, Andri. Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Tampubolon, Rotue Nuraini. dkk, peran perbankan menuju keuangan inklusi di Indonesia (studi kasus penyaluran kredit usaha mikro melalui program kemitraan Kampoeng bNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BMI 46), 2016-2017.
- World Bank, *Global Financial Development Report*, 2014..

www.OJK.co.id, di Akses pada 28 Apri 2020.